

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lonjakan pertumbuhan penduduk di suatu daerah telah membuka mata Pemerintah akan tantangan-tantangan yang muncul dalam menjaga kualitas hidup Masyarakatnya, mendorong ke arah pertumbuhan menuju konsep *Smart City* yang dipercepat oleh arus inovasi digital yang menyajikan layanan-layanan digital guna meningkatkan kesejahteraan warga (Anthony Jnr et al., 2021). Dengan lonjakan kepadatan penduduk di suatu wilayah, menjadi sebuah keharusan bagi Pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan yang esensial guna memenuhi kebutuhan warga dengan efektif (Talari et al., 2017).

Dalam tahapan pembangunan konsep tersebut, langkah awal dimulai dengan penciptaan ruang digital perkotaan; penggabungan perangkat keras dan lunak, diikuti dengan pengumpulan data dari berbagai instansi pemerintah, sensor dan alat pengamanan digital, serta pemanfaatan media sosial dan layanan elektronik di semua sektor. Dengan adanya lapisan baru berupa ruang dan teknologi digital, tercipta kapasitas untuk merubah dan mengoptimalkan seluruh aspek kota, termasuk aspek ekonomi, kehidupan, utilitas, dan tata kelola pemerintahan (Kominos et al., 2019). Sebagai dasar pembangunan, konsep *e-government* menjadi pondasi utama dalam pembangunan konsep *Smart City*, yang mana konsep ini lebih dulu dikenal oleh Pemerintah dan Masyarakat dalam tata kelola pemerintahan Indonesia daripada konsep *Smart City*.

Seiring dengan jalannya perkembangan teknologi, negara maju maupun negara berkembang semakin mengarah pada pemanfaatan *e-government* guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlibatan Masyarakat dalam proses administrasi (Karman et al., 2021). *E-Government* diartikan sebagai suatu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah dengan mempunyai tujuan agar tercapainya peningkatan dalam hal pelayanan publik dengan memberikan pilihan kepada Masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses suatu informasi publik (Maris et al., 2023). Pengembangan *e-government* ini telah lama menjadi fokus utama transformasi dalam dunia administrasi publik di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia yang kini juga

tengah memperlihatkan komitmen kuat terhadap penerapan teknologi informasi dalam layanan administrasi publik (Farida et al., 2020).

(Pramono, 2022) menggambarkan *e-government* sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara Pemerintah dan *Stakeholder* Masyarakat, yang melibatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan sederhananya, *e-government* diartikan sebagai upaya Pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk mengelola pemerintahan. Melalui konsep *electronic government* ini, berbagai inovasi dalam pemerintahan berbasis elektronik muncul, termasuk sistem pelayanan publik berbasis *online*, sistem administrasi dan perijinan berbasis *online*, sistem pengaduan *online*, dan beragam inovasi lainnya (Gustomy, 2018).

Implementasi konsep ini merupakan manifestasi dari era digitalisasi, di mana dalam era digitalisasi 4.0, semua aktivitas bergantung pada kekuatan teknologi informasi yang dikenal sebagai era *Internet of Things* (IoT) (Mubarrak et al., 2019). Untuk menyelenggarakan konsep ini maka diperlukan kebijakan dan strategi pengembangan untuk *e-government* (Maris et al., 2023). Dan hal ini telah didasari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dan didukung pula oleh regulasi terkait antara lain Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk itu, dalam peningkatan kualitas implementasi *e-government* berbagai upaya harus dilakukan secara terus menerus agar keberhasilan penerapan *e-government* pada suatu daerah dapat tercapai (Elysia et al., 2017).

Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada setiap proses layanan administrasi publik atau melalui penerapan *e-government*, cara ini dapat memudahkan setiap Masyarakat sebagai penerima layanan dan Pemerintah sebagai pemberi layanan tanpa harus bertatap muka secara langsung. Tidak hanya itu, melalui *e-government* pelayanan publik dapat tercipta menjadi transparan, proses dari pelayanan dapat diketahui, akuntabel pun dapat terwujud dan juga hal-hal yang menyimpang terhindarkan sehingga pelayanan menjadi efektif dan efisien (Ilmu et al., 2021).

Berdasarkan adanya instruksi terkait penerapan konsep *e-government*, maka Kabupaten Balangan yang merupakan salah satu dari 13 (tiga belas) kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan yang juga didasari dengan perkembangan dan perubahan paradigma oleh Pemerintah Pusat yang mendorong setiap Pemerintah Daerah nya untuk mulai menerapkan *e-government* dalam menjalankan pelayanan publik juga turut serta menjalankan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu implementasi yang konkrit terhadap pelaksanaan konsep *e-government*. SPBE ini mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengotomatisasi proses-proses administratif dan keputusan dalam pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Sebagai bentuk intervensi Pemerintah dalam mendorong percepatan Implementasi *e-government* di Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 dengan tujuan mencapai birokrasi berkelas dunia dimana tata kelola pemerintahan semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik semakin mudah, cepat, dan terjangkau, maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa semua instansi pemerintah harus menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bentuk pelaksanaan terhadap konsep *e-government* (Hidayah et al., 2022).

Dalam hal ini, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan serta Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik guna mendukung penyelenggaraan pemerintah dalam hal pelayanan publik (BPK, 2022), maka Kabupaten Balangan juga tengah berupaya turut menerapkan konsep *e-government* melalui implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Meskipun potensi besar yang dimiliki oleh SPBE dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi pemerintahan masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Tantangan tersebut meliputi masalah keamanan data, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta perubahan budaya dan

regulasi yang diperlukan dalam mengadopsi SPBE. Maka dari itu, evaluasi terkait pelaksanaan SPBE sangatlah penting untuk dilakukan.

Pada tahun 2022 lalu, Kabupaten Balangan juga telah melakukan evaluasi terkait pelaksanaan SPBE yang ditangani langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi melalui Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana beserta Tim Koordinasi SPBE Nasional. Yang mana evaluasi ini dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu (Kemenpanrb, 2022). Selain itu, pemantauan dan evaluasi SPBE ini juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilaksanakan, indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2022 bernilai 2,4 atau berada pada predikat Cukup. Sedangkan indeks minimal sebuah Pemerintah Daerah sudah dapat dikategorikan sebagai penerap konsep SPBE dengan baik berada pada nilai 2,6. Berikut nilai dan domain indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2022 disajikan pada data dibawah ini:

Tabel 1.1 Domain dan Indeks SPBE Pemkab Balangan Tahun 2022

Nama Indeks	Nilai 2022
SPBE	2,44
Domain Kebijakan SPBE	2,70
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,00
Domain Tata Kelola SPBE	2,00
Perencanaan Strategis SPBE	2,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,75
Penyelenggara SPBE	2,00
Domain Manajemen SPBE	1,00

Penerapan Manajemen SPBE	1,00
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,13
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,10
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,17

Sumber: Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Kab. Balangan 2022

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Domain Layanan SPBE bernilai 3,1 atau setara dengan kategori Baik, dilanjutkan dengan Domain Kebijakan SPBE bernilai 2,7 atau setara dengan katogeri Baik, Domain Tata Kelola SPBE bernilai 2,0 atau setara dengan kategori Cukup, dan Domain Manajemen SPBE bernilai 1,0 atau setara dengan kategori Kurang. Pada Domain Tata Kelola SPBE, terdapat Ketersediaan Infrastruktur TIK yang masih dalam kategori kurang membuat domain tersebut masih bernilai rendah. Serta Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK juga bernilai 1,00 yang membuat domain Manajemen SPBE berada pada nilai 1,00 atau Kurang. Artinya, selain harus berfokus pada peningkatan Penyelenggara SPBE (Pemerintah), Pemerintah Kabupaten Balangan sendiri juga harus segera melakukan peningkatan terhadap segala hal yang berkaitan dengan Manajemen SPBE di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan, juga segera memperhatikan ketersediaan infrastruktur TIK yang berfungsi sebagai penunjang untuk menjalankan konsep *e-government* maupun SPBE dengan baik.

Berbicara tentang bagaimana proses penerapan konsep *e-government* ini, terdapat satu hal yang perlu dicermati bersama, hal tersebut meliputi *technology e-readiness* atau kesiapan teknologi/elektronik pada suatu pemerintahan. Selama ini, Pemerintah telah menciptakan beberapa teknologi baik itu berbentuk inovasi daerah dan sebagainya dan menerapkannya pada keseharian dalam proses pelayanan publik. Tetapi, pada beberapa daerah ternyata Pemerintah nya sendiri belum siap untuk menerapkannya. Kegagalan dalam penerapan tersebut taklain disebabkan oleh ketidakpahaman Pemerintah terhadap bagaimana kesiapan elektronik (*e-readiness*) (Elbahnasawy, 2014).

Berdasarkan hasil Pemingkatan *E-Government* Indonesia (PeGI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, tingkat kesiapan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan *e-government* membuktikan bahwa masih belum merata, masih banyak daerah yang belum optimal dalam mengimplementasikan *e-government* dengan rata-rata hasil penilaian PeGI nasional masih berada dalam kategori kurang, yakni dengan skor indeks <2.6 (Nugroho et al., 2020). Maka dari itu, kesiapan elektronik (*e-readiness*) merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh Pemerintah dalam rangka mewujudkan penerapan *e-government* di suatu daerah. Yang mana *e-readiness* sendiri didefinisikan sebagai tingkat kesiapan seseorang, organisasi, maupun negara dalam mengadopsi dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan manfaat serta hasil yang optimal.

Dengan mengukur *e-readiness* terhadap suatu pemerintahan daerah, maka Pemerintah dapat mengidentifikasi isu-isu yang menjadi kendala dalam proses penerapan *e-government* dan dilakukan strategi alternatif yang tepat (Joseph, 2018). Hasil penilaian *e-readiness* mampu membantu pemerintah mengukur tahap kesiapannya, mengidentifikasi kesenjangannya dan kemudian mendesain ulang strategi pemerintahannya masing-masing. Heek (2003) melalui (Prmono, 2022) menjelaskan bahwa 85% implementasi *e-readiness* mengalami kegagalan di negara-negara berkembang (35% kegagalan total dan 50% kegagalan parsial) dan hanya 15% yang dianggap berhasil. Maka dari itu kemudian munculah konsep *e-readiness* sebagai alat untuk mengukur kesiapan penerapan *e-government*, terutama di setiap Kabupaten/Kota yang termasuk pada wilayah negara berkembang.

Berbicara tentang kesiapan teknologi/elektronik (*e-readiness*) khususnya pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan, hal tersebut dapat diukur dari beberapa aspek. Pertama yakni dalam hal Infrastruktur TIK. Kesiapan pemerintahan daerah dalam menghadapi era digital mampu diukur dari ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, seperti jaringan internet, perangkat keras dan perangkat lunak, serta sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi tersebut. Kedua, kebijakan dan regulasi TIK. Tingkat kesiapan pemerintahan daerah juga mampu dilihat dari kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu

konsep yang mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, yakni kesiapan pemerintah daerah dalam mengadopsi TIK yang dapat dilihat dari kemampuan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, termasuk dalam hal keterampilan teknis dan manajerial dalam mengelola teknologi tersebut. Terakhir, yakni kesiapan anggaran (biaya).

Kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi era digital juga dapat dilihat dari segi kemampuan keuangan untuk menginvestasikan dana dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk dalam hal pengadaan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*), serta infrastruktur yang mendukung pada pengembangan teknologi tersebut. Maka dari itu, sebelum menerapkan konsep *e-government* Pemerintah Daerah perlu menelaah sejauh mana kesiapan infrastruktur TIK yang meliputi jaringan internet, perangkat keras dan perangkat lunak, dan sumber daya manusia hingga biaya serta regulasi sudah memenuhi guna menunjang keberhasilan penerapan dari konsep tersebut.

Sumber Daya Manusia dalam hal ini yaitu Pemerintah sebagai pelaksana yang terampil menjadi faktor utama penentu berhasil atau tidaknya implementasi *e-government*. Kemampuan dan kecerdasan mereka bukanlah sekedar pelengkap teknologi, melainkan menjadi landasan utama yang menentukan arah perkembangan suatu kota dalam menerapkan gagasan *e-government* (Dionisia Mariani et al., 2020). Peran yang dimainkan sangatlah fundamental dalam mewujudkan visi *e-government* (Julianto P et al., 2022), dan hakikatnya elemen tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan implementasi *e-government* pada setiap pemerintahan daerah (Kamatula, 2019).

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan salah satu aspek paling berpengaruh terhadap kesiapan elektronik (*e-readiness*) pemerintah melaksanakan *e-government*, dalam hal ini disebut sebagai SDM internal yang merupakan para pegawai pemerintahan sendiri (Zulfadli, 2019). Pada kondisi saat ini, sebagian besar SDM Pemerintah Kabupaten Balangan belum sepenuhnya memiliki kemampuan sesuai standard yang dibutuhkan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara profesional untuk menunjang tugas serta kewajiban dalam setiap pekerjaannya. Hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya SDM Pemerintah

yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam penggunaan teknologi di setiap SKPD.

Dalam hal infrastruktur TIK yang meliputi ketersediaan layanan jaringan internet yang cepat dan stabil juga menjadi salah satu aspek fundamental dan menjadi aspek pendukung terhadap kesiapan elektronik atau teknologi (*e-readiness*) untuk menerapkan konsep *digital government* ini. Yang mana dimulai pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan mempunyai target agar seluruh desa di Wilayah Kabupaten Balangan dapat terjangkau layanan jaringan internet. Dan terhitung sampai dengan tahun 2022 akhir, sudah tercapai 148 desa yang terjangkau akan layanan jaringan internet dari total keseluruhan 157 desa di Kabupaten Balangan. Jika dilihat dari jumlah tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan dalam hal ini sudah mengusahakan dengan maksimal terhadap penyediaan layanan jaringan internet karena mengingat hanya tersisa 9 desa yang belum terjangkau layanan jaringan internet di Kabupaten Balangan, yang mana penyediaan layanan jaringan internet juga merupakan salah satu aspek fundamental dalam kesiapan teknologi pemerintahan menuju penerapan *e-government*.

Namun, satu hal yang perlu diingat bahwa dengan tersedianya layanan jaringan internet yang cepat dan stabil, masih banyak infrastruktur TIK lainnya yang juga perlu disiapkan secara bersamaan, baik itu perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*), dan infrastruktur lainnya yang berfungsi sebagai penunjang pelaksanaan konsep. Pada akhir tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Balangan sempat gagal saat melakukan percobaan penerapan *Smart City* yang diawali dengan penerapan di lingkungan pemerintahan atau *e-government* terlebih dahulu, hal tersebut dikarenakan SDM Pelaksana atau Pemerintahnya yang belum terbilang siap untuk melaksanakan program serta beberapa sebab lainnya seperti biaya penerapan yang belum teranggarkan dengan matang, yang mana hal ini menjadikan Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam. Dan terhitung sejak awal Tahun 2020 sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Balangan kembali terus berenergi dan melakukan pembenahan agar pelaksanaan *e-governement* pada Pemerintahan Kabupaten Balangan dapat berjalan dengan baik.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai bagaimana kesiapan teknologi (*e-readiness*) Pemerintah menuju penerapan *Smart City* juga telah banyak dilakukan.

(Waheduzzaman et al., 2017) dalam karya tulisnya menyatakan bahwa penelitian terhadap kesiapan (*e-readiness*) ini fundamental dilakukan di setiap pemerintahan karena sebagian besar sistem *e-government* memerlukan pemenuhan kebutuhan strategis (keadaan permanen dan kesiapan seluruh organisasi untuk perubahan sistemik berskala besar yang terjadi di *e-government*), maka dari itu sebelum menerapkan kebijakan *Smart City* pemerintah harus melibatkan proses penilaian terhadap kesiapan elektronik yang berpusat pada masyarakat di suatu wilayah. Sedangkan (Anjani et al., 2019) dalam penelitiannya “Evaluasi Tingkat Kesiapan Pemerintah Kota Batu Dalam Menerapkan Pemerintahan Berbasis Elektronik (*E-Government*) Dengan Menggunakan *ICT Readiness*” menjelaskan bahwa pada Tahun 2018 Pemerintah Kota Batu melalui Bappelitbangda melakukan pembuatan *ICT Road Map* yang berfungsi sebagai bahan acuan perencanaan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan implementasi TIK di Pemerintahan Kota Batu. Hal tersebut dilakukan karena penerapan *e-government* pada Pemerintahan Kota Batu dinyatakan masih terdapat beberapa kendala. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batu melakukan evaluasi kesiapan dalam penerapan *e-government* dengan membuat *ICT Road Map* yang didalamnya berisi 4 (empat) faktor penilaian yakni: Organisasi, Ketersediaan TIK, Infrastruktur TIK, serta Keamanan dan Lingkungan Hukum.

Berdasarkan latar belakang yang sudah Penulis paparkan yang mana diketahui Indeks SPBE di Kabupaten Balangan masih berada pada tingkat kategori Cukup juga sampai saat ini belum diketahui sejauh mana tingkat Kesiapan Teknologi Pemerintah Kabupaten Balangan dalam penggunaan dan penerapan TIK khususnya untuk pelaksanaan *e-government*, maka dari itu Penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan ke dalam karya tulis Skripsi dengan judul “Analisis Kesiapan Teknologi Pemerintahan (*E-readiness*) Dalam Mewujudkan Pelaksanaan *E-Government* di Kabupaten Balangan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang deskripsi permasalahan yang telah dijelaskan, maka pada penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan teknologi pemerintahan (*e-readiness*) Kabupaten Balangan untuk melaksanakan *E-Government*?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Balangan untuk melaksanakan *E-Government*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah tersebut ialah:

1. Memperoleh hasil kajian yang akurat mengenai kesiapan teknologi (*e-readiness*) Pemerintah Kabupaten Balangan untuk menerapkan *E-Government*.
2. Untuk mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Balangan yang menghambat kesiapan teknologi (*e-readiness*) pemerintahan untuk pelaksanaan *E-Government*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka kajian ini diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan sanggup memberikan data atau informasi baru yang dapat digunakan untuk memperkaya materi khususnya pada mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan (TIP). Hal ini mampu memberikan pemahaman lebih luas untuk Mahasiswa terhadap konsep-konsep teknologi informasi pemerintahan serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran karena dapat menyediakan contoh tambahan terhadap kasus-kasus secara nyata tentang bagaimana penerapan teknologi informasi pada pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi jendela ilmu pengetahuan secara umum serta dapat digunakan sebagai rujukan dan sumber referensi pada penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, khususnya mengenai Kesiapan Teknologi Pemerintahan (*e-readiness*) dalam mewujudkan *E-Government*.

b. Secara Praktis

Penelitian mengenai kesiapan teknologi pemerintahan atau *e-readiness*, diharapkan dapat menyediakan solusi bagi tantangan yang muncul dalam penggunaan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan. Harapannya, kajian ini akan memberikan gambaran yang akurat tentang sejauh mana kesiapan teknologi khususnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, dalam perjalanan menuju implementasi *E-Government*. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan dan evaluasi yang berguna bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan mengenai tingkat kesiapan teknologi pemerintahan, yang akan berperan sebagai pendukung dalam mewujudkan Kabupaten Balangan dalam menerapkan *E-Government*. Dengan demikian, kajian ini juga diharapkan dapat membantu Pemerintah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

E. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan pemaknaan dari konsep yang digunakan dalam sebuah penelitian yang akan memberikan kemudahan bagi peneliti saat mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Dalam penelitian ini yang merupakan definisi konseptual ialah:

1. Kesiapan Elektronik (*E-readiness*)

Kemampuan atau ukuran kesiapan suatu negara untuk terjun dalam dunia elektronik atau teknis dikenal dengan istilah *e-readiness*. Secara teoritis, kesiapan elektronik mencakup unsur-unsur seperti bakat teknis, keterampilan manajerial, pengaruh sosial budaya terhadap adopsi dan penggunaan TIK, dan akses terhadap infrastruktur TIK. Sebaliknya, kesiapan elektronik, secara umum, merupakan ukuran kapasitas individu, kelompok, atau masyarakat dalam menggunakan TIK untuk mencapai tujuan yang sama. Pengaturan dan lingkungan sekitar mungkin mempengaruhi banyak faktor mengenai kesiapan elektronik. Dengan menilai kesiapan elektronik, kita dapat memastikan seberapa siap infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi pengguna, perusahaan, dan pemerintah, serta seberapa cocok infrastruktur tersebut untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

Kesiapan elektronik baru dan terintegrasi yang diusulkan (Mutula, 2006) dalam studinya menekankan akses informasi dengan mempertimbangkan sejumlah bidang yang relevan, seperti organisasi, ICT, SDM, dan bantuan lingkungan eksternal, ke dalam evaluasi terpadu. Evaluasi kesiapan elektronik biasanya memasukkan informasi ke dalam TIK daripada menekankan pentingnya informasi sebagai landasan fundamental bagi kemampuan organisasi atau individu untuk menggunakan TIK di era informasi global. 5 (lima) alat penilaian kesiapan elektronik pada daftar di atas harus memberikan akses terhadap data primer pada alat *e-readiness* yang ada saat ini. Mirip dengan alat sebelumnya, alat ini menggabungkan banyak segmen *e-readiness* yang dipisahkan menjadi beberapa produk *e-readiness* yang terintegrasi ke dalam satu alat (Mutula, 2006).

2. *Electronic Government (E-Government)*

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjanjikan kecepatan penyampaian informasi atau efisiensi, serta jangkauan yang global juga dengan transparansi. Oleh karena itu, dalam era digitalisasi saat ini guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satu upayanya adalah melalui penggunaan TIK atau yang lebih dikenal dengan sebutan *e-government* (Mariano, 2019). *Electronic government* diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi oleh Pemerintah dengan tujuan memberikan informasi dan peningkatan dalam pelayanan publik.

Definisi *e-government* secara luas mengacu kepada suatu cara bagi Pemerintahan dalam menggunakan TIK yang paling inovatif untuk menyediakan warga negara dan sektor bisnis kemudahan dalam mengakses informasi, meningkatkan kualitas layanan dan memberikan kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Definisi tersebut sesuai dengan pemikiran Grönlund & Horan (2004) yang menjelaskan bahwa terdapat tiga tujuan dalam pengimplementasian *e-government* meliputi; pemerintahan yang lebih efisien, pelayanan yang berkualitas, dan meningkatkan proses demokrasi. Pada akhirnya pengimplementasian sistem *e-government* menciptakan tata pelayanan yang baik (Lenak et al., 2021).

E-government dinilai lebih inovatif ketika memanfaatkan TIK yang lahir pada Revolusi Industri 4.0. Perkembangan TIK pada era Revolusi Industri 4.0 dapat menjadi kesempatan untuk mempercepat pengimplementasian *e-government* dan terciptanya *e-governance* karena data dan informasi semakin terdigitalisasi, misalnya dalam hal *e-budgeting*, *e-reporting* dan bentuk elektronik lainnya dalam dunia pemerintahan (Ismail, 2019). Tuntutan atas pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel mendorong Pemerintahan lainnya mulai memanfaatkan teknologi internet sebagai salah satu media yang saat ini berkembang sangat pesat. Saat ini, *e-government* diterapkan karena kebutuhan Masyarakat dalam hal mempermudah akses agar terciptanya pelayanan publik yang baik secara merata dan menyeluruh. Dengan adanya *e-government* ini, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan kualitas pelayanan yang prima kepada Masyarakat setempat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan (Lenak et al., 2021).

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penarikan batasan yang menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih *substantive* dari suatu konsep. Pada definisi operasional disini mencakup hal-hal fundamental pada penelitian yang memerlukan penjelasan yang bersifat spesifik, rinci, tegas dan jelas yang menggambarkan karakteristik variabel-variabel penelitian dan hal-hal yang dianggap fundamental (Martha, 2018), definisi operasional penelitian mencakup hal-hal yang penting bagi lapangan dan memerlukan penjelasan yang tepat, komprehensif, kuat, dan tidak ambigu yang menjadi ciri ciri-ciri variabel penelitian. Untuk mengukur gejala atau variabel yang diteliti, setiap peneliti harus merancang alat ukur yang sesuai dengan sifat variabel yang konsepnya telah ditetapkan (Ningsih, 2018). Berdasarkan fenomena yang Penulis teliti, berikut ialah tabel operasionalisasi konsep yang digunakan mengacu pada teori *E-readiness* dari Mutula dan Brakel dengan penetapan indikator serta faktor-faktor yang relevan dengan karakteristik objek penelitian terhadap penelitian kali ini, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Konsep, Indikator, dan Sub Indikator

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Analisis Kesiapan Teknologi Pemerintahan (<i>E-readiness</i>) Dalam Mewujudkan <i>E-Government</i> di Kabupaten Balangan	Penilaian Kesiapan Teknologi Pemerintahan (<i>E-readiness</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan TIK <ol style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan Layanan Jaringan Internet b. Ketersediaan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak c. Anggaran (Biaya) 2. Kesiapan SDM <ol style="list-style-type: none"> a. Kesiapan SDM Pelaksana (Pemerintah) 3. Kesiapan Lingkungan Eksternal <ol style="list-style-type: none"> a. Instrumen Hukum b. Kemauan (<i>Political Will</i>)

Sumber: Faktor-faktor *e-readiness* berdasarkan teori Mutula dan Brakel.

G. Metode Penelitian

Penulis penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Salah satu jenis metodologi penelitian yang menghasilkan analisis tanpa menggunakan statistik disebut penelitian kualitatif. Fokus penelitian kualitatif ini ialah kualitas, bukan kuantitas, dan informasi yang dikumpulkan berasal dari observasi langsung, wawancara, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik yang diteliti, bukan dari kuesioner. Selain itu, penelitian kualitatif lebih fokus pada proses dibandingkan produk akhir. Sebab, jika kemengenaian antar komponen yang diteliti terlihat pada saat proses penelitian, maka akan semakin jelas (Fairus, 2020).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengkaji bagaimana kesiapan teknologi atau “*e-readiness*” berhubungan dengan implementasi *E-Government* dengan menggunakan penelitian deskriptif dan studi kasus pada Pemerintahan Kabupaten Balangan. dimana data yang terkumpul akan dilakukan analisis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif tertulis. Untuk mewujudkan *E-Government*, Peneliti berupaya mengumpulkan data akurat mengenai kesiapan teknologi atau *e-readiness* yang dimiliki Pemkab Balangan. Maka

dari itu, uraian dan penjelasan temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penilaian bagi pengambil kebijakan atau Pemerintah Daerah di masa depan, khususnya Pemerintah Kabupaten Balangan, guna meningkatkan standar kesiapan teknologi atau “*e-readiness*”, dan bantuan dalam proses penerapan *E-Government*.

2. Sumber Data

(Creswell, 2018) mendefinisikan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari sebuah objek baik itu individu maupun sekelompok orang yang dianggap berasal dari permasalahan sosial atau kemanusiaan. Yang mana pada penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang tidak terlalu berfokus pada angka atau nilai dalam pengukuran variabelnya serta tidak melakukan suatu pengujian dengan menggunakan statistik. Berdasarkan hal tersebut, adapun sumber data dalam penelitian ini yakni:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau dari orang pertama. Jenis data ini tidak tersedia dalam bentuk file, tetapi data hanya bisa didapatkan dengan langsung dicari melalui narasumber (informan) yakni orang yang kita jadikan sebagai objek penelitian atau orang yang juga dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data. Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan tertulis, dokumentasi (foto, dan sebagainya) terhadap subjek penelitian yang telah ditentukan berdasarkan kriteria yang relevan terhadap penelitian yang berada dibawah naungan instansi mengenai atau sebagai pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan, dan beberapa tokoh Masyarakat di Kabupaten Balangan yang juga menjadi informan terhadap penelitian kali ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah ada sebelumnya yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai data penunjang dari sumber pertama. Dimana data sekunder ini dapat menjadi data argumen pendukung oleh peneliti dari data primer. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang mengenai dengan Kesiapan Teknologi Pemerintahan (*e-readiness*) dan juga diperoleh melalui artikel, jurnal, dan skripsi atau penelitian terdahulu mengenai dengan Analisis Kesiapan Teknologi Pemerintahan (*e-*

readiness) menuju penerapan *E-Government*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Fase terpenting dari suatu penelitian yakni pada pengumpulan data (Banjarsari, 2018). Proses memperoleh data untuk tujuan penelitian disebut pengumpulan data; tanpa data, peneliti tidak dapat menciptakan hasil. Kelengkapan dan kualitas data yang dihasilkan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas penelitian dalam metode kualitatif. Saat mengumpulkan data, pertanyaan-pertanyaan berikut biasanya dipertimbangkan: apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Maka dari itu, untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif kali ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Metode pengumpulan data melalui observasi merupakan salah satu bagian paling penting untuk melihat fakta atau kenyataan yang terjadi pada sebuah penelitian (Nur Fajrina, 2022). Dalam hal observasi, Peneliti melakukan pengamatan pada sebuah objek dengan memanfaatkan panca indera, yakni dengan penglihatan dan pendengaran dengan tujuan untuk mendapatkan suatu informasi yang diperlukan agar mampu menjawab permasalahan pada penelitian kali ini. Yang mana pada observasi penelitian kali ini Peneliti akan melaksanakan Magang Riset pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOSAN) Kabupaten Balangan agar pelaksanaan observasi terhadap pencarian informasi mengenai bagaimana Kesiapan Teknologi Pemerintahan (*e-readiness*) Kabupaten Balangan menuju penerapan *E-Government* dapat terlaksana secara maksimal. Namun, observasi tidak hanya dilakukan pada satu tempat saja, tetapi juga dilakukan pada instansi mengenai seperti pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Balangan serta beberapa tokoh Masyarakat Kabupaten Balangan yang juga menjadi informan terhadap penelitian.

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara juga dapat diartikan sebagai sebuah interaksi dengan orang lain untuk mendapatkan data dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian. Wawancara pada penelitian ini dilakukan

terhadap subjek penelitian yang telah ditentukan berdasarkan kriteria yang relevan terhadap penelitian yang berada dibawah naungan instansi mengenai atau sebagai pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan, dan beberapa tokoh Masyarakat Kabupaten Balangan yang juga menjadi responden terhadap penelitian.

c. Studi Literatur

Studi literatur ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka melalui membaca dan mencatat, lalu mengelola bahan penelitian (Judithia, 2019). Salah satu cara untuk melakukan penelitian kepustakaan ini ialah dengan mencari literatur teori-teori para ahli yang pernah dipublikasikan atau belum, baik dalam format *hard copy* maupun *soft copy* yang dapat diakses melalui *e-book*, jurnal *online*, dan sumber lainnya. Guna memperkuat analisa melalui kajian-kajian terdahulu atau literatur-literatur yang relevan dengan Kesiapan Teknologi Pemerintah (*e-readiness*) menuju *E-Government* yang telah dilakukan oleh Kabupaten/Kota lain yang tidak hanya di lingkup Indonesia saja namun juga di beberapa daerah diluar. Indonesia yang tercantum dalam daftar pustaka, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik studi literatur untuk mengumpulkan data primer.

d. Dokumentasi

Baik berupa bahan tekstual, film, foto, maupun karya monumental, teknik dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi data dalam penelitian. Semua sumber ini menawarkan informasi selama proses penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber, antara lain wawancara informan, peraturan perundang-undangan dan peraturan bupati mengenai, catatan penelitian lapangan, dan foto atau gambar yang digunakan sebagai bukti pendukung penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOSAN) Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di Komplek Perkantoran Jalan Ahmad Yani Km 4,4 Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kota Paringin, Kabupaten Balangan. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut peneliti

dapat mencari informasi atau data yang valid dan relevan mengenai penelitian ini.

Selain itu, guna mendukung upaya eksplorasi dalam penelitian kali ini, maka peneliti juga akan melakukan penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Km 4,3 Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kota Paringin, Kabupaten Balangan. Instansi ini juga dipilih dikarenakan terdapat banyak informasi atau data pendukung yang dapat diperoleh untuk penelitian kali ini pada instansi tersebut.

5. Subjek Penelitian

Pemilihan subjek penelitian, atau informan dalam konteks ini, merupakan salah satu aspek terpenting dalam penelitian kualitatif. Subyek penelitian ialah individu-individu yang diikutsertakan dalam penelitian sebagai sampel karena mempunyai pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti dan mampu membocorkan informasi. Strategi sampel purposif digunakan dalam penyelidikan ini. Pengambilan informan yang mempunyai tujuan tertentu sesuai dengan subjek penelitian atas dasar dianggap mempunyai informasi yang diperlukan untuk penelitian disebut dengan *purposive sampling*.

Peneliti mempercayai bahwa informan yang dijadikan sebagai subjek penelitian merupakan pihak yang memang kompeten akan dalam memberikan dan memaparkan informasi terhadap fenomena yang diteliti. Adapun subjek penelitian yang dapat memberikan informasi valid dan mempunyai kemengenaian dalam mempersiapkan teknologi pemerintahan (*e-readiness*) menuju *E-Government* di Kabupaten Balangan sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan;
- b) Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan; Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan
- c) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan;

- d) Kepala Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan;
- e) Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan;
- f) Beberapa tokoh Masyarakat Kabupaten Balangan yang bersedia menjadi informan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Tahap terpenting dalam proses penelitian ialah analisis data karena kesimpulan yang diambil dari data tersebut dapat digunakan untuk menginformasikan keputusan yang diambil untuk mengatasi fenomena atau masalah yang diteliti. Sederhananya, analisis data ialah metode untuk menyederhanakan pemrosesan data ke dalam format yang lebih sederhana untuk dipahami dan digunakan. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan model analisa data Miles & Huberman (Michael Huberman, 1992) dengan teknik analisis data dengan 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

Grafik 1.3 Tahapan Analisis Data



Sumber: diolah kembali dari Tahapan Analisa berdasarkan Miles & Huberman (1992)

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada tahapan ini Peneliti secara objektif mengumpulkan seluruh informasi atau data yang diperoleh dari Partisipan Penelitian selama penelitian dilakukan di lapangan, termasuk informasi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti mengurangi jumlah informasi yang mereka miliki dengan memprioritaskan item yang paling penting dan esensial, merangkumnya untuk mempersempit fokus dan mengidentifikasi tren atau tema apa pun. Karena banyaknya data yang dikumpulkan di lapangan, maka data tersebut harus direduksi agar data lebih mudah dibaca dan tepat.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Data ditampilkan setelah melalui langkah reduksi data dan perolehan data. Penelitian kualitatif melibatkan penyajian data dengan menggunakan berbagai alat bantu visual seperti diagram alur, bagan, kemengenaian antar kategori, dan penjelasan yang jelas dan ringkas. Data disajikan sedemikian rupa alhasil memudahkan pembaca dan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memastikan bahwa data yang tersisa setelah reduksi rapi dan terorganisir dengan baik, berdasarkan pola hubungan. Penyajian data dalam penelitian ini diberikan dalam bentuk prosa naratif dengan beberapa tabel, grafik, dan data pendukung lainnya berupa foto dan sejenisnya.

d. Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion and Verification*)

Setelah pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah selanjutnya dalam tahap akhir. Penting untuk diingat bahwa kesimpulan penelitian hanya bersifat abadi karena dapat berubah jika pengumpulan data lebih banyak terbukti menghasilkan bukti yang lebih kuat yang mendukung temuan awal. Oleh karena itu, bukti kuat harus dikumpulkan oleh peneliti agar hasil akhirnya dapat diterima. Berdasarkan temuan observasi dan wawancara, diambil kesimpulan dengan mengambil inti gagasan atau kesimpulan dari setiap rangkaian penelitian. Sumber dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini digunakan sebagai metode verifikasi.